

# PRIORITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMDA

DADANG KURNIA, Ak., MBA,CA, CGAP, QIA, CFRA, ASEAN CPA , CGCAE

**DEPUTI KEPALA BPKP**

*Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*



# OUTLINE MATERI

- AREA PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

---

- ARAHAN PRESIDEN DALAM RAKORNASWASIN TAHUN 2021

---

- AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN (APP) dan AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH (APPD) 2021

---

- PENGAWASAN PENERIMAAN DAERAH

---

- PENGAWASAN EFEKTIVITAS PENGELUARAN DAERAH

---

- PENGAWASAN PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI DAERAH

---

- PENGAWASAN PROGRAM PRIORITAS DI DAERAH

---

- TRANSFORMASI SPIP TERINTEGRASI DAN PK APIP

---

- SINERGI DAN KOLABORASI PENGAWASAN

---

# AREA PENGAWASAN

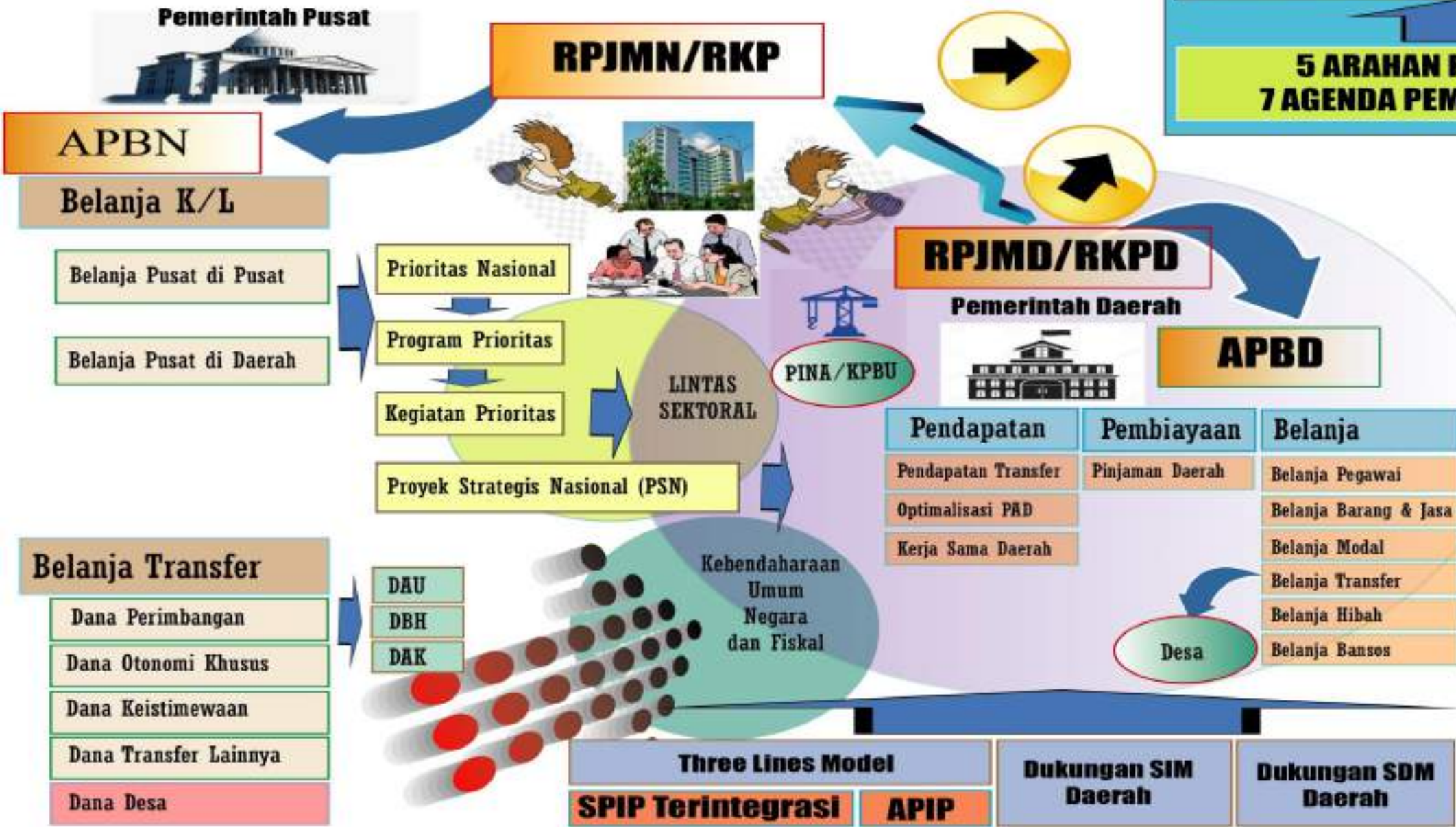
## PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI DAERAH

### KESEJAHTERAAN RAKYAT

5 ARAHAN PRESIDEN  
7 AGENDA PEMBANGUNAN

#### LINGKUNGAN STRATEGIS

01. UU No 33/2004 ttg Perimbangan..
02. UU No 06/2014 ttg Desa
03. UU NO 23/2014 ttg Pemda
04. UU No 11/2020 ttg Cipta Kerja & Turunannya
05. PP No 60/2008
06. PP No 08/2016 ttg Dana Desa
07. PP No 12/2017 ttg Binwas...
08. PP No 11/2019 Perub PP43/2014
09. PP No 12/2019 ttg Peng Keuda
10. PP No 72/2019 ttg Perangkat...



**APBN**  
Belanja K/L

Belanja Pusat di Pusat  
Belanja Pusat di Daerah

**Belanja Transfer**

- Dana Perimbangan
- Dana Otonomi Khusus
- Dana Keistimewaan
- Dana Transfer Lainnya
- Dana Desa

Prioritas Nasional  
Program Prioritas  
Kegiatan Prioritas  
Proyek Strategis Nasional (PSN)

DAU  
DBH  
DAK

Kebendaharaan Umum Negara dan Fiskal

Three Lines Model  
SPIP Terintegrasi    APIP    Dukungan SIM Daerah    Dukungan SDM Daerah

**RPJMD/RKPD**  
Pemerintah Daerah  
**APBD**

Pendapatan	Pembiayaan	Belanja
Pendapatan Transfer	Pinjaman Daerah	Belanja Pegawai
Optimalisasi PAD		Belanja Barang & Jasa
Kerja Sama Daerah		Belanja Modal
		Belanja Transfer
		Belanja Hibah
		Belanja Bansos

Desa

PINA = Pembiayaan Investasi Non Anggaran

KPBU = Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

“Saya minta **BPKP** dan seluruh **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** melihat betul, mencari **penyebab** lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa. Memberikan **solusi**, carikan solusinya. Menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan **cepat** dan **akuntabel**.”



**RAKORNAS  
WASIN 2021**  
RAJAT KOORDINASI NASIONAL  
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

“Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar **BPKP** dan **APIP kementerian, lembaga dan daerah kawal** dari hulu, sejak awal pada saat **perencanaan** terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekedar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini.”

## APP PUSAT 2021



## APP DAERAH 2021



### 67 PENGAWASAN tematik

- 
- 1 Aceh**
    - Dana Otsus
    - Pengelolaan Dana Baitul Mall
  - 2 Sumut**
    - TataKelola Danau Toba
    - Pembangunan Sport Center
  - 3 Sumbar**
    - Program Lumbung Beras
    - Pengembangan Geopark
  - 4 Riau**
    - Peralihan Blok Rokan
    - Penanganan Kebakaran Hutan
  - 5 Jambi**
    - Karhutla Jambi
    - Evaluasi PETI Jambi
  - 6 Bengkulu**
    - KEK Pulau Baai
    - Program Kartu Bengkulu Sejahtera
  - 7 Sumsel**
    - POPNAS 2021
    - Pengembangan Kawasan Terpadu
  - 8 Lampung**
    - Program Kartu Petani
    - Program Kawasan Terintegrasi
  - 9 DKI Jakarta**
    - Penyediaan Rumah DP 0
    - Reviu TataKelola Jak-lingko
  - 10 Jawa Barat**
    - Pengadaan dan Distribusi Vaksin
  - 11 Jawa Tengah**
    - Pengembangan Industri Terpadu batang
    - Tata Kelola Produksi Gula
  - 12 Yogyakarta**
    - Dana Keistimewaan u/ Program Desa Mandiri
    - Pariwisata Super Prioritas
  - 13 Jawa Timur**
    - Percepatan pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru
    - Dukungan Program Ketahanan Pangan
  - 14 Kalimantan Barat**
    - Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
    - Percepatan pembangunan kawasan industri
  - 15 Kalimantan Tengah**
    - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
    - Program Restorasi Gambut
  - 16 Kalimantan Selatan**
    - Pengelolaan Lahan Kritis
    - Peralatan Bencana Kebakaran Hutan
  - 17 Kalimantan Timur**
    - Konektivitas Pendukung Ibukota Baru
    - Pengelolaan Perijinan Tambang
  - 18 Sulawesi Utara**
    - Pendukung Destinasi Wisata Super Prioritas
    - KEK Bitung
  - 19 Sulawesi Tengah**
    - Rehab Pasca Bencana
    - Program Parimo Khatulistiwa
  - 20 Sulawesi Tenggara**
    - Kawasan Pariwisata Toronipa
    - Industri Agrobisnis
  - 21 Sulawesi Selatan**
    - Kawasan Khusus dan Bisnis Central
    - Pendukung Jalur Kereta API
  - 22 Bali**
    - Pusat Budaya Bali
    - Kawasan Nusa Penida
  - 23 NTB**
    - KEK Mandalika
    - Kawasan Industri Sumbawa
  - 24 NTT**
    - Wisata Labuan Bajo
    - Food Estate Sumba
  - 25 Maluku**
    - Lumbung Ikan Nasional
    - Lapangan Abadi Wilayah
  - 26 Papua**
    - Dana Otsus
    - PON XX dan Peparnas XVI
  - 27 Papua Barat**
    - Dana Otsus
    - Bandara Rendani Manokwari
  - 28 Kepri**
    - SDA di Laut Kepri
    - KEK Wilayah Kepri
  - 29 Bangka Belitung**
    - Geopark Belitung
    - Industri Tanjung Ular
  - 30 Banten**
    - Koridor Jalan Boru-Cikeusal
    - Ketahanan Pangan Prov Banten
  - 31 Gorontalo**
    - Program Kesejahteraan Petani
    - Hasil dan Pemasaran Perikanan
  - 32 Sulawesi barat**
    - Penanggulangan Benacana Sulbar
    - Program Mandiri Cerdas, Sehat
  - 33 Maluku Utara**
    - Lumbung Ikan Nasional
    - KEK Morotai
  - 34 Kalimantan Utara**
    - Kota Baru Mandiri
    - Program Budidaya Rumput Laut

Keterangan : 👍 Sudah dilaksanakan

## REALISASI PAD 2018 - 2021 (NASIONAL)

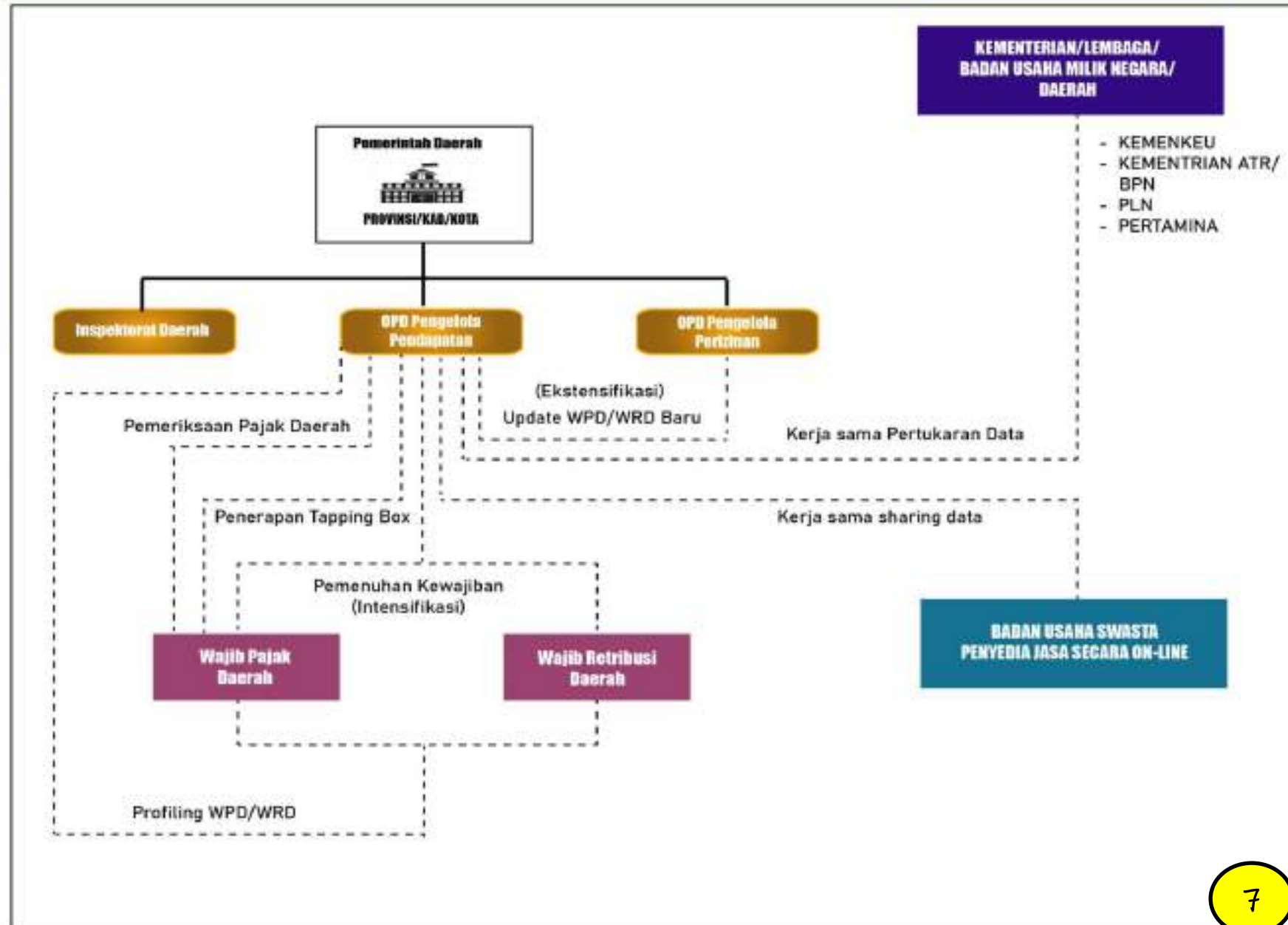
● TAHUN 2018	Rp 269,90 T		
● TAHUN 2019	Rp 295,52 T	↑	9,90 %
● TAHUN 2020	Rp 231,59 T	↓	-21,63 %
● TAHUN 2021 (Semester I)	Rp 94,26 T	↓	-18,60 % *)

Sumber Data : DJPK Kemenkeu

\*) : Asumsi realisasi penerimaan semester I 2020 sama dengan semester II 2020

## FOKUS PENGAWASAN OPAD :

- **Upaya Ekstensi Penerimaan PAD**
  - ✓ Potensi jenis pajak/retribusi baru
  - ✓ Potensi Wajib Pajak/Retribusi Daerah Baru
- **Upaya Intensifikasi Penerimaan PAD**
  - ✓ Kerja sama pertukaran data dgn K/L/BU
  - ✓ Kerja sama sharing data dgn BU Swasta
  - ✓ Penerapan Tapping Box
  - ✓ Penyusunan Profiling WP/WRD
  - ✓ Pemeriksaan Pajak Daerah





**Sumber Data :**

SIMTRADA DJPK Kemenkeu  
Per 27 Agustus 2021

Alokasi Tahun 2021

Realisasi Salur 2021

Prosentase Realisasi (%)

Prosentase Seharusnya (%)

DAU	DBH	DAK Fisik	DAK Non Fisk	DID	Otsus	DAIS
Rp377,78 T	Rp101,96 T	Rp63,64 T	Rp130,77 T	Rp13,50 T	Rp19,48 T	Rp1,32 T
Rp246,49 T	Rp 46,01 T	Rp 13,04 T	Rp 78,88 T	Rp 7,29 T	Rp 5,84 T	Rp1,05 T
65,25%	45,13%	20,15%	60,32%	54,02%	30%	80 %
66,67%	30 - 50 %	25 %	50 - 70 %	50 %	75%	80 %



**Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran**

- Ketepatan sasaran strategis dan indikatornya
- Keselarasan program/kegiatan dengan sasaran strategis
- Kesesuaian rincian kegiatan dengan maksud kegiatan
- Perbaiki perencanaan dan penganggaran program/kegiatan



**Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ**

- Identifikasi kendala/hambatan dalam merealisasikan anggaran beserta rekomendasi perbaikannya
- Identifikasi kendala/hambatan dalam proses PBJ beserta rekomendasi perbaikannya



**Evaluasi Penggunaan Dana Transfer termasuk Dana Otsus**

- Identifikasi kendala/hambatan dalam penyaluran dana transfer beserta rekomendasi perbaikannya
- Identifikasi kendala/hambatan dalam penggunaan dana transfer beserta rekomendasi perbaikannya
- Identifikasi kemanfaatan hasil program/kegiatan bersumber dana transfer
- Analisis atas efektivitas penggunaan dana transfer dalam pencapaian indikator sasaran



## Fokus Pengawasan

- Meyakinkan dukungan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran dari Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), beserta Major Project dan Proyek Strategis Nasional



RPJMD

RKPD

APBD

Renstra OPD

Renja OPD

DPA OPD

Kewenangan serta Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemda beserta OPD-nya

## Dukungan Pemda Terhadap PSN

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ✓ Aspek Persiapan Proyek   | ✓ Aspek Tata TKDN           |
| ✓ Aspek Penyediaan Lahan   | ✓ Aspek Pembangunan Fisik   |
| ✓ Aspek Tata Ruang         | ✓ Aspek Pengendalian Proyek |
| ✓ Aspek Pendanaan Proyek   | ✓ Aspek Regulasi            |
| ✓ Aspek Jaminan Pemerintah | ✓ Aspek Cipta Kerja         |
| ✓ Aspek Perijinan          | ✓ Aspek Pemanfaatan         |
| ✓ Aspek Pelaksanaan PBJ    |                             |

## Dukungan Pemda Terhadap PN, PP, KP & MP

### ✓ Aspek Kebijakan

Keberadaan, kecukupan dan ketepatan kebijakan pemda dalam mendukung pencapaian target sasaran PN, PP, KP dan MP

### ✓ Aspek Kelembagaan

Keberadaan dan berfungsinya organ pelaksana dukungan pemda terhadap PN, PP, PP, KP dan MP

### ✓ Aspek Perencanaan

Sinkronisasi target sasaran di pemda beserta OPD-nya dengan target sasaran PN, PP, KP dan MP

### ✓ Aspek Penganggaran

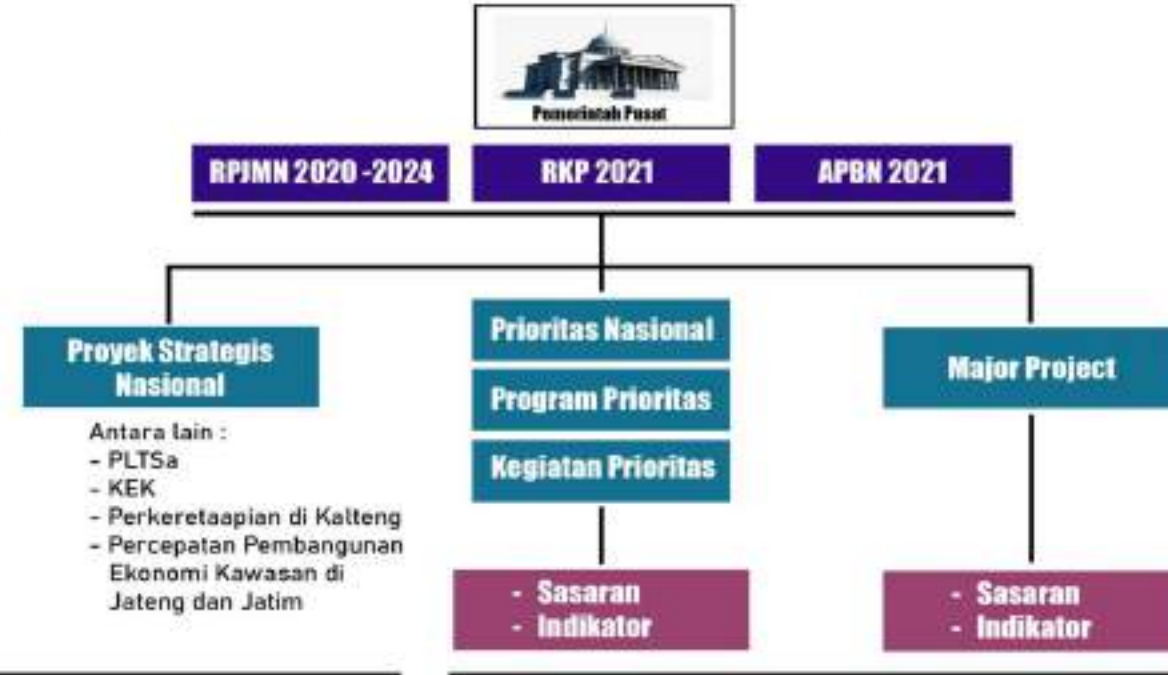
Keberadaan dan kecukupan alokasi anggaran program/kegiatan dukungan pemda serta kesesuaian dengan standar biaya

### ✓ Aspek Pelaksanaan

Efektivitas realisasi pelaksanaan program/kegiatan pemda dalam mendukung pencapaian sasaran PN, KP dan MP

### ✓ Aspek Capaian Hasil

Capaian indikator sasaran PN, PP, KP dan MP di masing-masing daerah



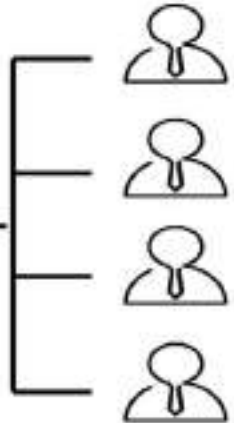


**BPKP Pusat**

PENYUSUNAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN SECARA NASIONAL



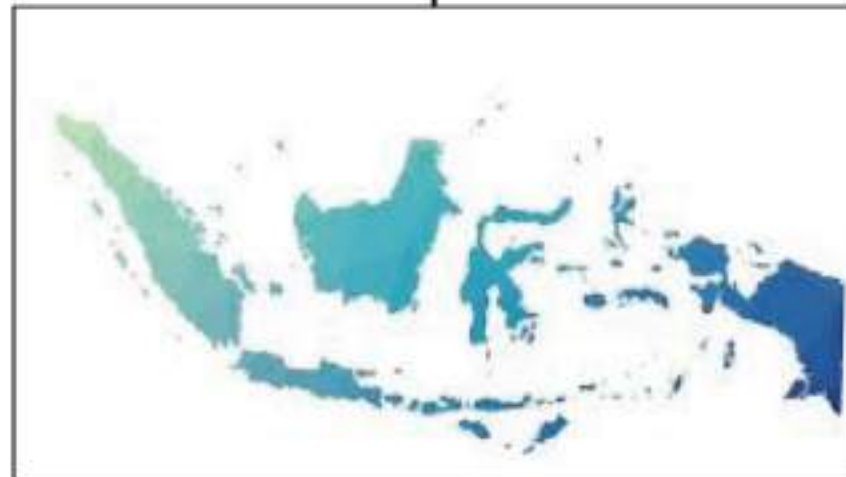
PENYAMPAIAN  
KE MITRA KERJA



**Program Strategis/Prioritas Daerah**

**IDENTIFIKASI**

- Kriteria :
- Skala Provinsi
  - Unggulan di masing2 wilayah
  - Dampaknya luas



**Panduan Umum**

**Penjaminan Kualitas**



**Tujuan/Sasaran Program**

**Proses Bisnis Program**

**Sumber Daya**

- Ketercapaian Tujuan/Sasaran
- Identifikasi Kendala/Hambatan Pelaksanaan Program
- Risiko dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program
- Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

FOKUS PENGAWASAN



**Perwakilan BPKP**

**Pengumpulan Data/Informasi**

**Pengusunan Panduan Teknis**

**Pelaksanaan Pengawasan**

**Penyusunan Laporan**

## Fokus Pengawasan

- Meyakinkan pelaksanaan proses bisnis penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan berjalan lancar dan akuntabilitasnya tetap terjaga

### SEB Mendagri dan Menkeu

Nomor 903/4253.A/SJ  
 Nomor SE-2/MK 07/2021  
 Tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD TA 2021 Dalam Rangka Pendanaan Penanganan COVID-19 dan Dampaknya

### SEB Mendagri dan Menkes

Nomor 440/4066/SJ  
 Nomor HK.01.08/Menkes/930/2021  
 Tentang Percepatan Pembayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Daerah yang menangani COVID-19

## PENANGANAN LIMBAH B3 MEDIS COVID - 19

Pembagian Urusan atas Penanganan Bahan Berbahaya, dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) - UU 23/2014

### PEMERINTAH PUSAT

- Pengelolaan B3
- Pengelolaan Limbah B3

### PEMERINTAH PROVINSI

Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

### PEMERINTAH KAB/KOTA

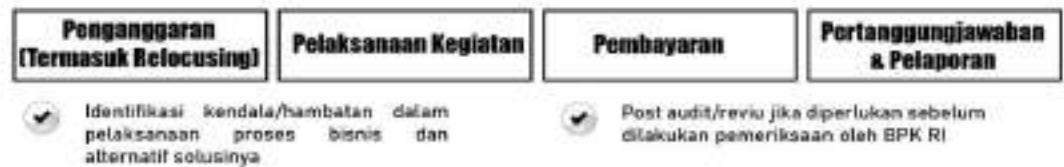
- Penyimpanan sementara limbah B3
- Pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota

### Instruksi Mendagri No 33 Tahun Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis dari Penanganan COVID-19 yang bersumber dari Fasilitas Isolasi Mandiri



## Proses Bisnis



Per 26 Agustus 2021 \*)

Anggaran	Rp39,24 T
Realisasi	Rp11,16 T
Persentase	28,44 %

- Penanganan COVID-19
- Dukungan Vaksinasi
- Dukungan Kelurahan Dalam Penanganan Pandemi
- Insentif Tenaga Kesehatan Daerah
- Belanja Kesehatan dan Kegiatan Prioritas Lainnya

- Dukungan Operasional Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
- Pemantauan & Penanggulangan Dampak KIPi COVID-19
- Distribusi, Pengamanan, Penyediaan Tempat Penyimpanan vaksin covid-19 ke taskes
- Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Per 26 Agustus 2021 \*)

Anggaran	Rp9,23 T
Realisasi	Rp3,87 T
Persentase	41,97 %

Sumber data : DJPK Kemenkeu



## Fokus Pengawasan

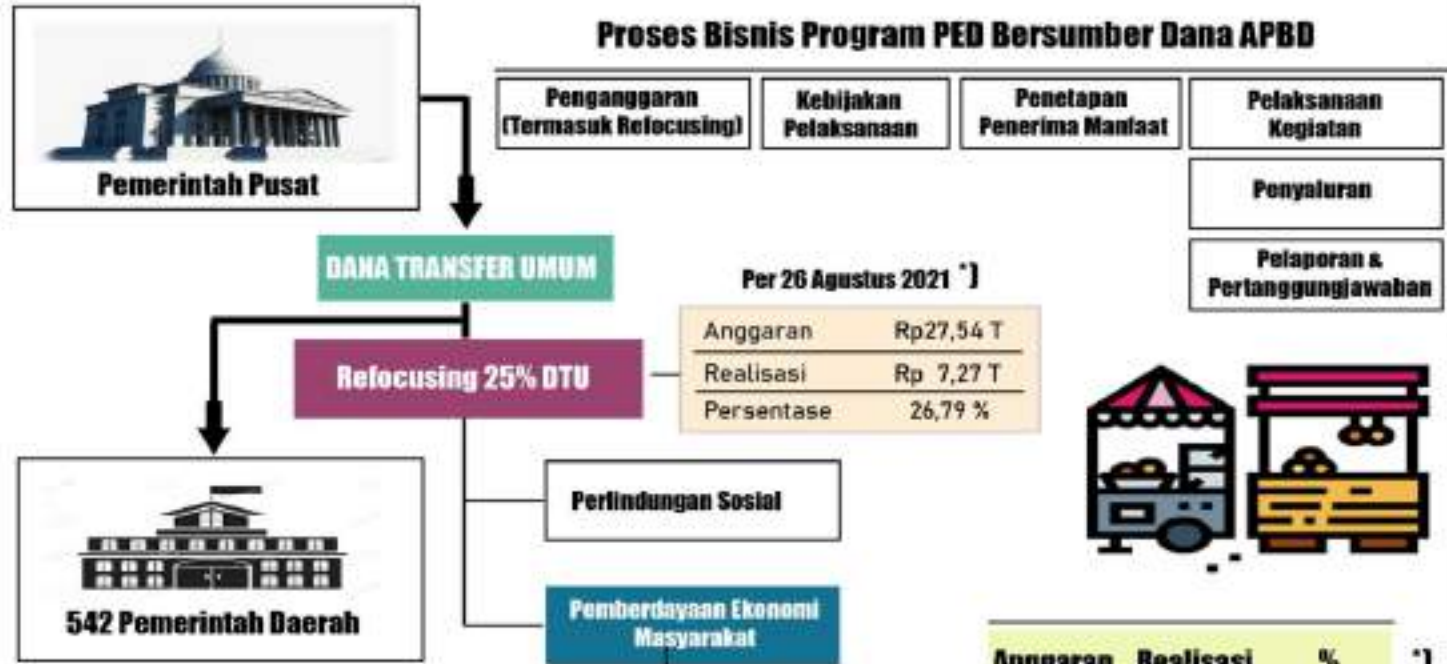
- Meyakinkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pemulihan ekonomi daerah

- Identifikasi kendala/hambatan dalam pelaksanaan proses bisnis dan alternatif solusinya
- Analisis capaian hasil dan kemanfaatan dari hasil pelaksanaan program pemulihan ekonomi daerah
- Post audit/reviu oleh APIP jika diperlukan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI

### SEB Mendagri dan Menkeu

Nomor 903/4253.A/SJ  
 Nomor SE-2/MK 07/2021  
 Tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD TA 2021 Dalam Rangka Pendanaan Penanganan COVID-19 dan Dampaknya

### Proses Bisnis Program PED Bersumber Dana APBD



Per 26 Agustus 2021 \*)

Anggaran	Rp27,54 T
Realisasi	Rp 7,27 T
Persentase	26,79 %

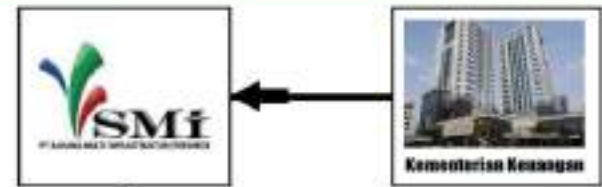


	Anggaran	Realisasi	%
Pemberdayaan UMKM	Rp 2,28 T	Rp0,56 T	23,43 %
Subsidi Pertanian	Rp 1,92 T	Rp0,42 T	21,89 %
Dukungan Ekonomi Lainnya	Rp 8,98 T	Rp2,54 T	28,36 %
<b>Total</b>	<b>Rp13,30 T</b>	<b>Rp3,53 T</b>	<b>26,54 %</b>

\*) Sumber data : DJPK Kemenkeu

### PP No 23 Tahun 2020 beserta perubahannya

Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional



### Pinjaman PEN Tahun 2020

Bunga 0 %  
 Alokasi : Rp 20 T  
 Realisasi Tandatangani Perjanjian : Rp 19,13 T  
 Realisasi salur ke Pemda Tahun 2020 : Rp 7,62 T  
 Tersedia untuk disalurkan Tahun 2021 : Rp 11,51 T  
 Penyaluran ke Pemda Tahun 2021 : Rp 2,62 T  
 Total realisasi salur sd 30 Agustus 2021 : Rp 10,24 T

### Pinjaman PEN Tahun 2021

Bunga 5,3 % sd 6,1 %  
 Alokasi : Rp 10 T  
 Pengajuan usulan pinjaman pada 38 Pemda senilai Rp 15,62 T  
 Sd 30 Agustus 2021 Telah ditandatangani pinjaman pada 19 Pemda senilai Rp5,32 T Namun belum ada realisasi pencairan

### PROSES BISNIS



## Fokus Pengawasan

- Ketepatan sasaran
- Hambatan/kendala penyaluran
- Perkembangan realisasi penyaluran
- Ketepatan penyaluran dan penggunaan
- Analisis pemanfaatan pinjaman PEN Daerah

## Fokus Pengawasan

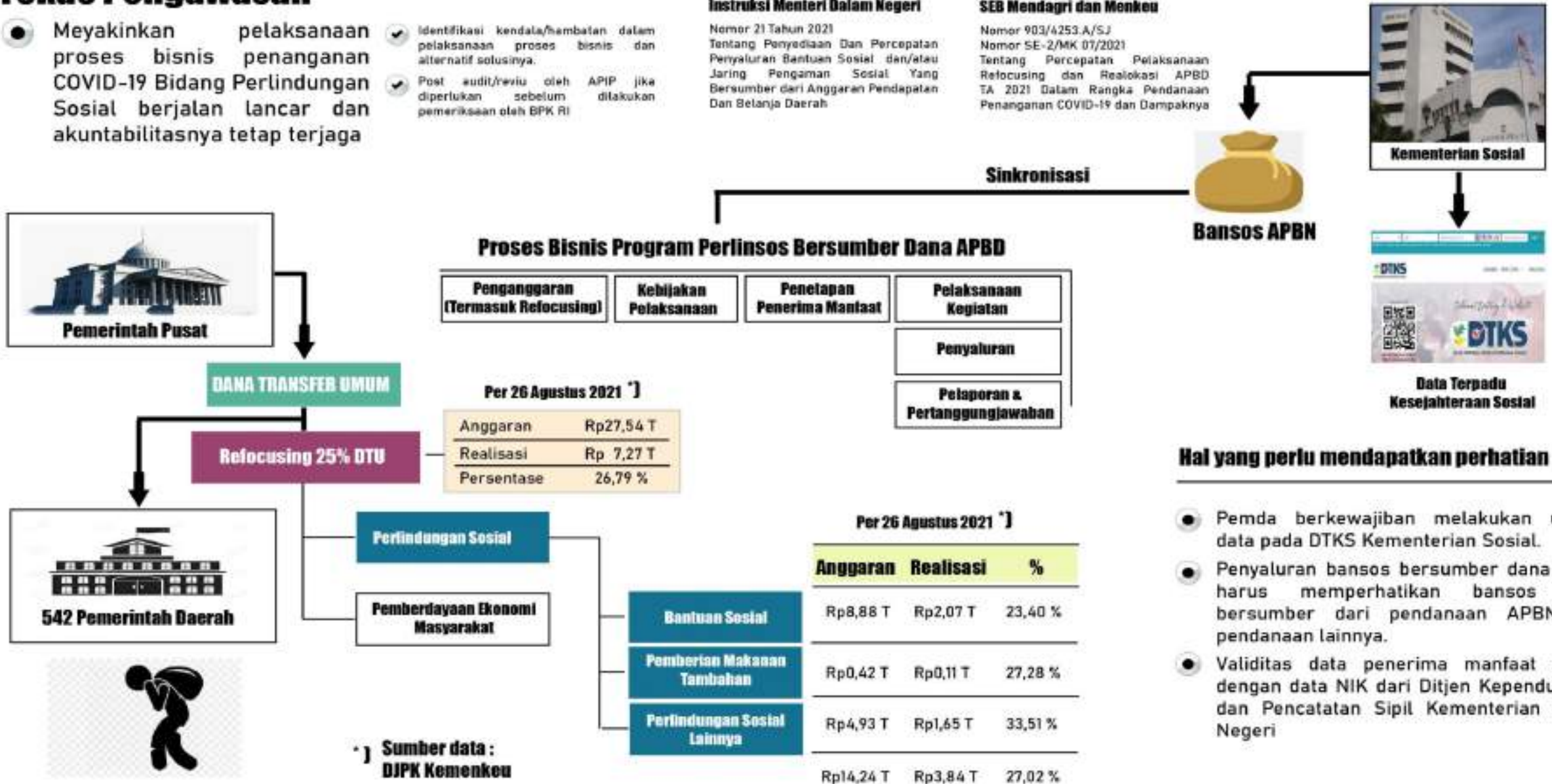
- Meyakinkan pelaksanaan proses bisnis penanganan COVID-19 Bidang Perlindungan Sosial berjalan lancar dan akuntabilitasnya tetap terjaga
- ✓ Identifikasi kendala/hambatan dalam pelaksanaan proses bisnis dan alternatif solusinya.
- ✓ Post audit/reviu oleh APIP jika diperlukan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI

### Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2021  
Tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

### SEB Mendagri dan Menkeu

Nomor 903/4253.A/SJ  
Nomor SE-2/MK 07/2021  
Tentang Percepatan Pelaksanaan Relocusing dan Realokasi APBD TA 2021 Dalam Rangka Pendanaan Penanganan COVID-19 dan Dampaknya





Kebijakan

Alokasi  
Sumber Daya



Kebijakan



### TUJUAN

- Menilai ketepatan penyaluran dan penggunaan Dana Desa dan Sisa Dana Desa.
- Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa dan Sisa Dana Desa
- Memberikan saran perbaikan atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa serta Sisa Dana Desa

### SASARAN

- Ketepatan penetapan rincian Dana Desa Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) serta ketepatan waktu dan jumlah penyaluran.
- Kecukupan perencanaan penggunaan Dana Desa.
- Kesesuaian realisasi penggunaan Dana Desa dengan prioritas yang ditetapkan dalam Regulasi.
- Kesesuaian penggunaan Dana Desa pada Kegiatan Padat Karya Tunai Desa dengan ketentuan.
- Kesesuaian penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dengan ketentuan.
- Kesesuaian penggunaan Dana Desa untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin di desa dengan ketentuan.
- Kesesuaian perlakuan atas sisa Dana Desa dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Efektivitas penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa desa ketentuan/peraturan.

# UPAYA PERBAIKAN TATA KELOLA MELALUI PENETAPAN TARGET LEVEL 3 PADA PENILAIAN SPIP DAN MR INDEKS (MRI) DI RPJMN

Gap antara Target 2021 dengan Baseline/Capaian 2020

## SPIP LEVEL ≥ 3

	Jml IP	Baseline (Capaian 2020)	2020	2021	Gap	2022	2023	2024
K/L	3	1	1	2	1	2	3	3
Provinsi	34	27	28	29	2	30	31	31
Kab/Kota	508	280	285	312	32	339	361	383
TOTAL	545	308	314	343	35	371	395	417

## MRI LEVEL ≥ 3

	Jml IP	Baseline (Capaian 2020)	2020	2021	Gap	2022	2023	2024
K/L	3	0	1	1	1	2	2	3
Provinsi	34	0	2	5	5	10	14	21
Kab/Kota	508	0	8	48	48	85	133	200
TOTAL	545	0	11	54	54	97	149	224

Sumber: RPJMN 2020-2024 dan Renstra Deputi PPKD 2020-2024

\*) Baseline merupakan realisasi capaian 2020  
 \*\*) Jumlah K/L 3 adalah K/L Mitra Deputi PPKD

**IMPLEMENTASI SPIP Terintegrasi (SPIP dan MRI dalam satu tools pengukuran)**

**DIPERLUKAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN TERINTEGRASI UNTUK Mendukung Pencapaian Tujuan Organisasi**



**KONDISI PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN SPIP, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGAWASAN APIP SAMPAI SAAT INI**

PENYELENGGARAAN BELUM SALING TERINTEGRASI

BELUM DIARAHKAN UNTUK MENGAWAL TUJUAN ORGANISASI

BELUM TERINTEGRASI DENGAN PENGENDALIAN ATAS FRAUD

PENILAIAN BELUM TERINTEGRASI

PENILAIAN BERFOKUS PADA PEMBERIAN SKOR

PENILAIAN TERKESAN DOCUMENT BASED

AoI & REKOMENDASI MASIH PARSIAL

AoI & REKOMENDASI BELUM DIPANTAU

### Kondisi Implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah

**Penetapan IKU MRI**  
18/542 (3,32%)

**Struktur MR**  
30/542 (5,54%)

**Kebijakan MR\***  
299/542 (55,17%)

**Menyusun RR**  
446/542 (82,28%)

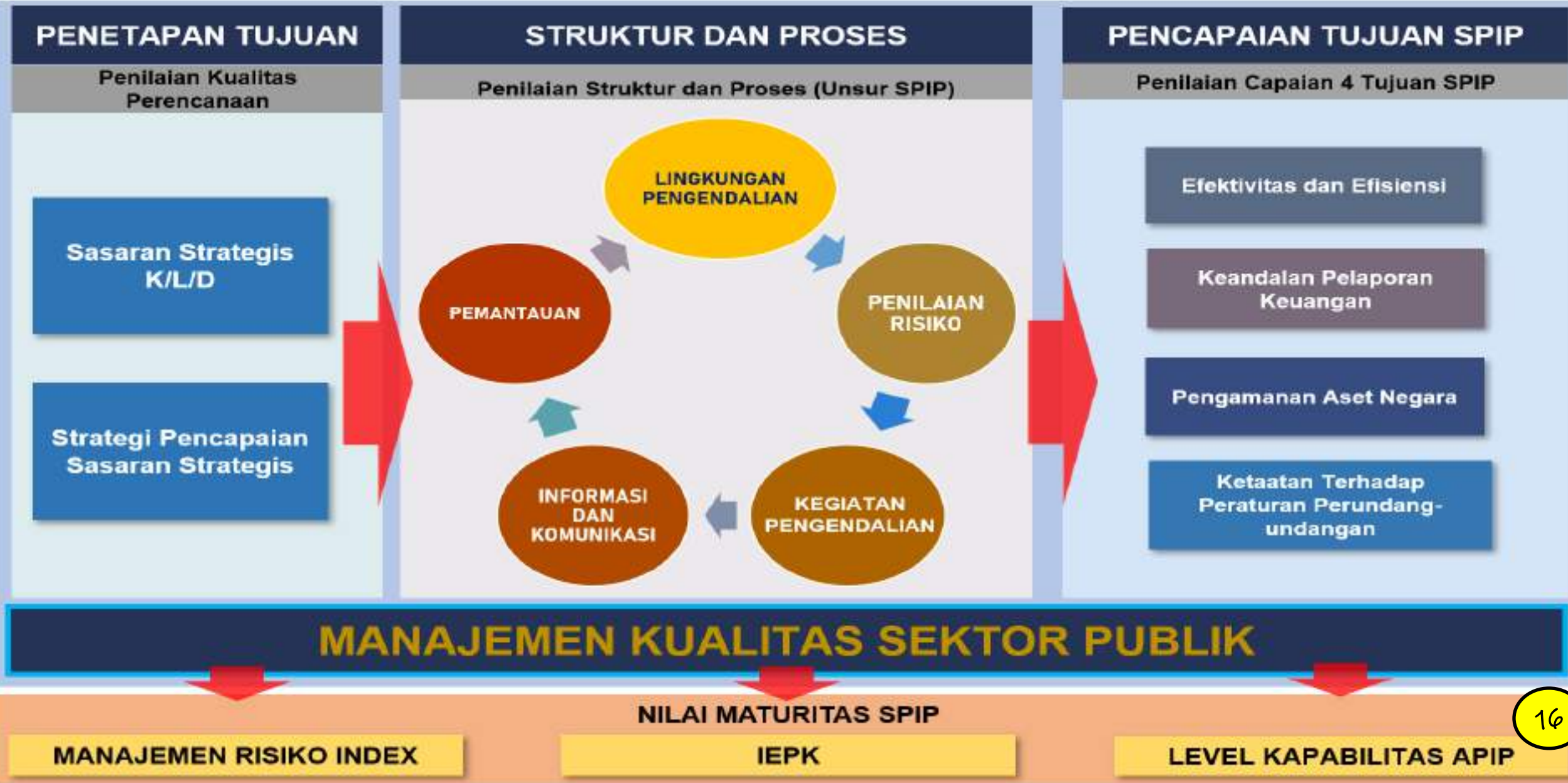
### Poin Penting Peningkatan Implementasi MR pada Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan BNPP

**Kemendagri:**  
Finalisasi Draft dan Penerbitan Permendagri MR serta Implementasinya.

**Kemendes PDTT:**  
Implementasi Permendesa PDTT Nomor 9/2020 tentang MR.

**BNPP:**  
Peningkatan Fungsi APIP untuk mendorong Implementasi MR.

# TRANSFORMASI SPIP TERINTEGRASI DAN PK APIP







**NOTA KESEPAHAMAN MENTERI DALAM NEGERI DENGAN KEPALA BPKP TENTANG KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TANGGAL 3 SEPTEMBER 2020**



**PERJANJIAN KERJA SAMA INSPEKTOR JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH TANGGAL 23 NOVEMBER 2020**



**NOTA KESEPAKATAN GUBERNUR SELURUH INDONESIA DENGAN KEPALA PERWAKILAN BPKP SECARA SEREMPAK TANGGAL 2 DESEMBER 2020**



**Perjanjian Kerja Sama Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Korupsi Pada Pemerintah Daerah antara Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK**



## Latar Belakang

- PP 72/2019 tentang Perubahan PP No 18/2016 tentang Perangkat Daerah mengamankan Kemendagri dalam mensupervisi kepada Inspektorat Daerah atas laporan pengawasan berindikasi penyalahgunaan kewenangan agar melibatkan BPKP.

## Ruang Lingkup

- Pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah  
*Supervisi pengawasan di lingkungan pemda atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah: peer review, coaching clinic, peningkatan kompetensi pemeriksaan investigatif*
- Peningkatan Kapabilitas APIP  
*Kewajiban kepada Kepala Daerah dan Inspektorat dalam mencapai Kapabilitas APIP Level 3 yang berkualitas*
- Pengawasan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah
  - ✓ Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - ✓ Pengawasan badan usaha milik daerah
  - ✓ Pengawasan keuangan desa

## Ruang Linkup Kerja Sama Mencakup Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada :

- Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah,
- Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa,
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,
- Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- Pencegahan dan Penanganan COVID-19 oleh pemerintah daerah,
- Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah
- Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan pada pemerintah daerah dan
- Penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah.

## A. PELAKSANAAN SUPERVISI KEGIATAN PENGAWASAN

- Pendidikan dan Pelatihan APIP (Diklat Audit Investigasi sebanyak 16 kelas tahun 2021 dan 14 kelas tahun 2020, serta Diklat PBJ/E-Tender sebanyak 6 kelas tahun 2021 dan 16 kelas tahun 2020)
- Coaching clinic sebanyak 13 penugasan di tahun 2021
- Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan sebanyak 4 penugasan pada tahun 2020/2021
- Audit atas BUMD sebanyak 13 penugasan pada tahun 2020/2021

## B. PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

- Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) bagi APIP Daerah
- Pedoman Audit Ketaatan
- Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
- Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko
- Panduan Program Kerja Audit Kinerja Tematik Pembangunan Destinasi Pariwisata
- Panduan Program Kerja Audit Kinerja Tematik Ketahanan Pangan
- Panduan Praktis Pemberian Peringatan Dini oleh APIP
- Pelaksanaan Pengawasan PBJ Alat Material Kesehatan (Almatkes) Penanganan Pandemi Covid-19 Bersumber pada Dana APBD
- Ekspose kapabilitas APIP Level 3
- Sertifikasi CGCAE

## C. PENGAWALAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Pengawasan APBD
  - ✓ Sosialisasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
  - ✓ Persiapan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran dan PBJ Daerah
  - ✓ Kerja Sama BPKP dan APIP dalam Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ Daerah
- Pengawasan BUMD
  - ✓ Evaluasi Kinerja PDAM
  - ✓ Evaluasi Kinerja BUMD Aneka Jasa
- Pengawasan Keuangan Desa
  - ✓ Penerapan SIA BUM Desa (pemantauan dan asistensi pengelolaan keuangan)
  - ✓ Bimtek Siswaskeudes



# TERIMA KASIH



*Innovative - Delivered - Effective - Accountable*

## **Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah**



**(021) 85910031  
(Hunting)**



**[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)**



**@bpkp\_id  
@ppkd.bpkp**



**humasbpkppusat  
ppkd.bpkp**



**BPKPgoid  
Deputi Ppkd Bpkp**



**@BPKPgoid**